BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan yang mendorong penulis menjadikan "Kepentingan Turki mendukung Palestina Menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa" sebagai judul dalam penulisan ini karena adanya ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang negara Turki (sebagai negara kekuatan baru Timur Tengah dalam menghadapi Israel) dan upayanya untuk membangun kembali pengaruhnya dalam pergaulan politik global, diantaranya melalui pencapaian tujuan besar ekonominya. Salah satu diantara tujuan besar ekonomi dan politiknya adalah pengamanan terhadap kepentingan-kepentingan Turki terhadap kedaulatan Palestina dengan memperkuat posisi dan kedudukannya di wilayah Timur Tengah. Hal ini menandakan kepentingan sekaligus keinginan Turki untuk menunjukkan diri kepada dunia internasional sebagai negara yang mempunyai peranan penting di Timur Tengah, menjaga predikatnya sebagai negara yang disegani di panggung internasional dan sebagian negara yang punya pengaruh di perpolitikan dunia internasional.

Disisi lain ini membuktikan kepentingan Turki di Timur Tengah khususnya dalam upaya mendukung kedaulatan negara palestina tidak main-main sehingga telah menjadi perhatian utama Turki dengan memperkuat pengaruhnya dikawasan ini. Masalah ini semakin menarik karena Palestina yang begitu strategis dan memiliki banyak pihak-pihak yang berkepentingan terhadap

negara tersebut. Sehingga negara Palestina telah menjadi ajang perlombaan pengaruh dan kekuatan di kawasan tersebut.

Bagi penulis pribadi, topik penulisan mengenai Kepentingan Turki Terhadap kedaulatan Palestina dengan mendukung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kawasan ini dan konflik yang terjadi dikawasan sampai kepada usaha-usaha pencapaian kepentingan masing-masing pihak pemangku kepentingan dalam mendukung kedaulatan Palestina, sehingga dapat bermanfaat bagi studi Ilmu Hubungan Internasional. Mengingat kawasan ini selalu mengalami pergolakan kajian ini akan menjadi semakin menarik dan berguna bagi studi Ilmu Hubungan Internasional.

Hal-hal tersebut membuat penulis ingin mencari tahu dan tertarik untuk mengakaji lebih jauh lagi tentang permasalahan bagaimana faktor-faktor yang menunjukan Turki mendukung Palestina menjadi anggota PBB. Dan untuk itulah tulisan ini diberi judul ***"Kebijakan Turki Mendukung Palestina menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2011"***

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dan kegunaan akademis yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah melakukan identifikasi dan mengetahui bagaimana kebijakan Turki Mendukung Palestina menjadi anggota PBB, Dan pada umumnya tujuan penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Turki adalah sebuah negara besar di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara; Bulgaria di sebelah barat laut; Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat; Georgia di timur laut; Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur; dan Irak dan Suriah di tenggara; dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental.[1]

Selama ini hubungan baik antara Turki dan Israel relatif terjaga pada 2002 hingga akhir 2008. Selama kurun waktu itu, Ankara menerima kunjungan Shimon Peres yang saat itu menjadi presiden Israel. Turki juga menjadi mediator perundingan damai Israel-Suriah. Kerenggangan hubungan kedua negara terjadi setelah Israel melancarkan invasi ke Gaza pada Desember 2008 yang menewaskan ratusan warga Palestina. Invasi itu tidak bisa diterima oleh rakyat Turki sehingga memantik gelombang protes di negeri itu.

Kalangan analis Turki menyatakan, pemerintah baru Israel gagal memahami dinamika dan kebijakan ”Turki yang baru”. Turki saat ini, menurut mereka, bukan lagi negara yang diperintah oleh militer yang biasa merepresi pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda, baik terkait isu domestik atau luar negeri. Karena itulah, sebuah pemerintahan yang ingin menjadi sahabat Turki juga harus mampu menggaet simpati warga negeri itu. Mereka berpendapat,

[1] http://www.asiamaya.com/panduasia/iraq/e-01land/ei-lan10.htm , diakses 20 Oktober 2011, jam 12.30 WIB.

normalisasi hubungan kedua negara hampir mustahil terwujud tanpa pemahaman Israel akan ”Turki yang baru”. [2]

Israel dan Turki terkunci dalam pertikaian pahit sejak Mei 2010 ketika pasukan komando angkatan laut Israel menyerbu konvoi enam kapal yang mencoba mencapai Jalur Gaza. Penyerbuan itu membunuh sembilan orang. Israel memberlakukan blokade laut ke Jalur Gaza. Turki mengusir duta besar Israel dan membekukan hubungan militer dan perjanjian perdagangan pertahanan. Hubungan bertambah panas ketika PM Erdogan mengancam akan mengirim kapal perang untuk mengawal kapal Turki yang mencoba mencapai Gaza.

Presiden Abdullah Gul mengatakan Turki berharap bahwa negara Palestina merdeka didirikan berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota. Hubungan diplomatik antara Turki dan Israel telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir terkait isu Palestina yang mendapat dukungan Turki untuk resolusi lebih lanjut dalam upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral.

Hingga saat ini konflik antara Israel dengan Palestina masih berkecamuk. Berbagai upaya perdamaian telah diusahakan namun kedua negara enggan untuk berdamai sehingga kawasan Timur Tengah masih tetap bergejolak, tidak kondusif, dan masih sulit untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, tingkat taraf hidup dan bahkan demokratisasi yang ingin ditanamkan.

---

[2] “Turki Dulu, Kini, dan Israel-Turki di Masa Mendatang” dalam http://m.suaramerdeka.com, diakses 17 Oktober 2011, jam 15.33 WIB.

Konflik Israel-Palestina menimbulkan pengaruh (*influence*) bagi beberapa negara di belahan dunia lainnya di samping menimbulkan dampak bagi berbagai bidang kehidupan dalam negaranya sendiri. Pengaruh ini khususnya dirasakan oleh negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah. Ancaman kedaulatan dan keamanan di negara Israel dan Palestina menjadi ancaman pula di beberapa negara Timur Tengah lainnya. Karena bukan tidak mungkin setelah berhasil menguasai Palestina, Israel juga menginginkan untuk segera menduduki wilayah negara tetangga Palestina. Keinginan Israel untuk menduduki dan berkuasa di Palestina merupakan ancaman besar bagi kaum Muslim yang ada di Timur Tengah, karena wilayah Palestina dipercaya sebagai kota suci bagi pemeluk agama Islam, setelah Mekkah dan Madinah.

Sementara bagi negara-negara lain (di Asia dan di Eropa), konflik berkepanjangan yang terjadi antara Israel dan Palestina ini merupakan salah satu pelanggaran terhadap HAM yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Permasalahan Israel-Palestina juga mempengaruhi pasaran dan produktifitas minyak dunia serta mempengaruhi negara lain yang memiliki kepentingan di Timur Tengah semisal Amerika Serikat yang bekerja sama dengan Israel guna memperluas basis militernya di negara Timur Tengah serta berusaha menanamkan ideologinya di negara-negara Timur Tengah yang tergolong radikal, dan masih banyak kepentingan-kepentingan negara lain yang ada di Timur Tengah.

Perkembangan terbaru di Palestina adalah bawa dua kelompok besar faksi politik Palestina, Hamas dan Fatah, berjabatan tangan di Kairo, Mesir, pada

tanggal 27 April 2011. Mereka sepakat untuk mengakhiri perseteruan sejak 2006 akibat kemenangan Hamas dalam pemilu demokratis tidak diakui Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Langkah selanjutnya adalah sepakat untuk mengajukan negara Palestina sebagai anggota PBB pada tanggal 20 Oktober 2011. Dari total 192 negara anggota 109 negara PBB sudah menyatakan dukungan mereka terhadap kemerdekaan negara Palestina.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang sudah di paparkan, maka rumusan masalah yang bisa diambil adalah ***"Mengapa Turki Mendukung Kedaulatan Palestina menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa?"***

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai pedoman bagi Penulis untuk mempermudah melakukan kegiatan penelitian dan analisis data yang ada serta mencegah terjadinya distorsi pembahasan terhadap objek penelitian dan meluasnya pembahasan ke arah yang tidak signifikan, maka Penulis mencoba mengajukan kerangka berpikir sebagai acuan dalam penelitian tentang peranan Turki dalam mendukung Palestia menjadi anggota PBB. Kerangka pemikiran merupakan teori dan pendapat para ahli yang tentunya berkorelasi dengan objek yang diteliti serta dapat memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian hingga diakui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesis. Teori-teori tersebut akan diterapkan melalui pola piker silogisme, yakni pola pikir yang disusun berdasarkan pernyataan premis mayor dan premis minor serta sebuah

kesimpulan. Dinamikan hubungan internasional dalam konteks kekinian menggambarkan tentang suatu realitas lebih baik bagi masing-masing anggota. Setiap Negara-bangsa tidak bisa melepaskan diri dari hubungan antar Negara yang melintasi batas Negara dimana setiap Negara memiliki masalah yang begitu kompleks dengan Negara lain.

Hubungan ini memerlukan koordinasi yang tidak sederhana oleh karena tiap-tiap Negara memiliki kedaulatan/ sovereignity. Hubungan yang terjalin antar Negara tersebut mempunyai tiga pola, yakni kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan konflik (*conflict*) antar Negara dengan Negara lainnya. Dalam memhami dinamika interaksi internasional, maka tidak terlepas dari studi hubungan internasional. Ruang lingkup hubungan internasional menurut penjelasan K.J Holsti dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Wawan Juanda berjudul Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis, bahwa :

> Istilah hubungan internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat Negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga-warga. Pengkajian hubungan internasional, termasuk di dalamnya pengkajian tentang politik luar negeri atau politik internasional dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai Negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan-perkembangan nilai-nilai dan etika internasional[3].

Ilmu hubungan internasional sendiri muncul setelah perang dunia I (1914 – 1918) yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terulang kembali perang dunia yang mengakibatkan kehancuran umat manusia dan kebudayaannya, serta ingin menciptakan suatu negara yang aman, damai, berdaulat, dan saling

[3] KJ Holsti, 1992 *Internasional Politics, A Frame Work for Analysis*, Prentce Hall of India. New Delhi, Third Edition, hal. 6

menghormati satu sama lain. Dalam manifestasi hubungan internasional, setiap Negara memiliki politik luar negerinya masing-masing. Politik luar negeri tersebut berlandaskan pada kepentingan nasional (*national interest*).

Analisa politik luar negeri diarahkan untuk mengoptimalkan pencapaian kepentingan nasional dengan dipusatkan pada penelitian kepentingan nasional dan tujuan bangsa, alternative kebijakan yang diambil pemerintah dan juga bangsa biasanya bersifat tetap. Kepentingan nasional Turki misalnya, dengan merangkul Negara-negara muslim (Palestina) dan membangun aliansi peradaban Islam di dalamnya, dunia Islam bisa menjadi kekuatan dahsyat yang dapat menyeimbangi kekuatan dunia yang saat ini masih didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Mengenai kepentingan nasional, dijelaskan oleh Dahlan Nasution dalam bukunya Konsep Politik Internasional, bahwa : "Kepentingan nasional memberikan konstelasi yang diperlukan dalam kebijaksanaan nasional suatu Negara yang sadar memperhatikan kepentingan nasionalnya dalam situasi yang berubah cepat, akan lebih cenderung untuk mempertahankan keseimbangan dan melanjutkan kearah usaha tujuannya daripada mengubah kepentingannya dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru".[4]

Oman Heryaman menyatakan bahwa "kepentingan nasional yang dirumuskan suatu Negara sebagai identifikasi dan adaptasi kepentingan terhadap system lingkungan internasional (domestic environment)". Kepentingan nasional diupayakan dengan jalan kebijakan luar negeri yang merupakan instrument

[4] Dahlan Nasution, *Konsep Politik Internsional*, Jakarta : LP3ES,1983, hal 43

dalam mengupayakan segala kepentingan nasional yang berorientasi diluar dari batas Negara-negaranya. Jack C. Plano dalam Kamus Hubungan Internasional menjelaskan pengertian kebijakan luar negeri sebagai berikut :

"Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu Negara dalam menghadapi Negara lain/ politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminology kepentingan nasional. Politik luar negeri yang spesifik dilaksanakan oleh sebuah Negara sebagai sebuah inisiatif/ sebagai reaksi terhadap inisiatif oleh Negara lain"[5].

Teori pembuatan kebijakan luar negeri yang diungkapkan oleh William D. Coplin bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi beberapa factor determinan, antara lain :

1. Situasi politik domestik, termasuk faktor budaya sebagai dasar tingkah laku politik;
2. Situasi ekonomi dan militer domestic, termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan;
3. Konteks internasional, yaitu pengaruh Negara-negara lain atau konsentrasi politik internasional.

Keputusan luar negeri juga bisa dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri (politik, ekonomi, dan militer) dan konteks internasional. Konteks internasional diartikan sebagai produk berbagai keputusan dan tindakan politik luar negeri pada masa lampau, sekarang, dan akan datang yang dapat diantisipasi.

---

[5] Plano, Jack C dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional,* CV Arbidin, Bandung, hal. 5

Menurut William D. Coplin dalam teori pembuat keputusan *(Decision Making Proses)*[6] yang mengatakan bahwa apabila kita menganalisa kebijakan luar negeri suatu Negara, maka kita harus mempertanyakan peran dari pemimpin Negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin Negara (pembuat keputusan) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya tindakan politik luar negeri tersebut dianggap sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi pembuat keputusan. Yang pertama adalah kondisi politik di Negara tersebut termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer di Negara tersebut termasuk faktor geografis yang menjadi pertimbangan untuk pertahanan dan keamanan. Ketiga, konteks internasional atau situasi di Negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Untuk lebih memperjelas mengenai proses pengambilan keputusan, berikut ini dapat digambarkan dalam skema proses pengambilan keputusan menurut William D. Coplin.

[6] William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis,* CV Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 30.

Gambar 1
Tentang Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri
(menurut William D. Coplin)

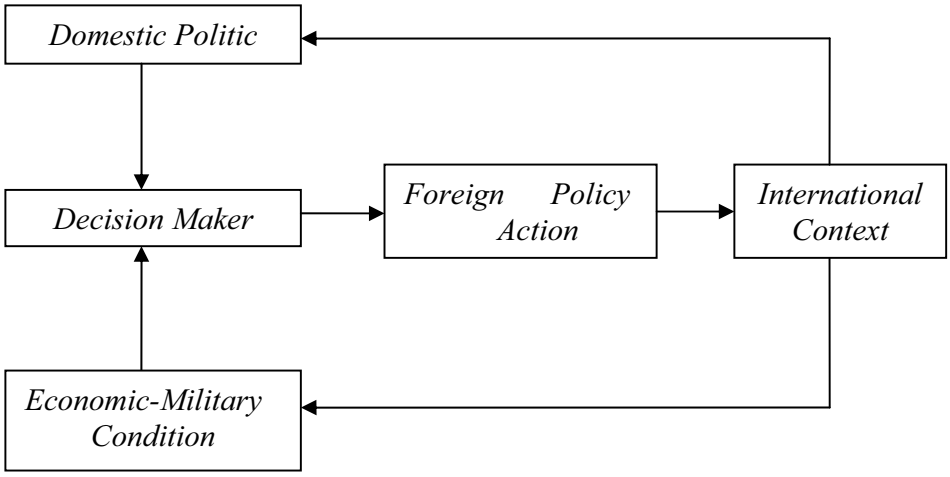

Sumber : William D.Coplin, Pengantar Politik Internasional,
Suatu Telaah Teoritis, CV. Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 30

Dari ilustrasi bagan diatas menjelaskan bahwa teori ini menjalankan ketiga variabel sehingga menghasilkan tindakan politik luar negeri suatu negara yang dapat dikategorikan dalam dua faktor yaitu Faktor Internal Berupa Politik dalam Negeri dan kapabilitas ekonomi dan militer. Sedangkan faktor eksternal yaitu berupa konteks internasional.

Berdasarkan skema diatas, dapat dijelaskan Turki mendukung Palestina untuk menjadi anggota PBB dipengaruhi oleh tiga hal yakni politik dalam negeri, keadaan ekonomi dan militer, serta konteks internasional sangat berpengaruh terhadap pembuat keputusan dalam menentukan kepentingan nasionalnya.

1. Politik dalam negeri

Menurut Coplin yang melatarbelakangi pembuatan keputusan luar negeri adalah kondisi politik dalam negeri di negara tersebut. Termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik di negara tersebut.

Dukungan Turki terhadap Palestina untuk menjadi anggota PBB tidak terlepas dari kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa kembali di Turki meraih kemenangan gemilang dalam pemilihan parlemen dengan 50 persen suara. Partai ini menang dengan margin yang lebih besar dibandingkan pada pemilu sebelumnya di 2007. Sejak Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan pertama berkuasa pada 2002, Erdogan secara perlahan dapat mengubah negara sekuler ke arah yang lebih religius, berusaha untuk membawa kebudayaan Islam ke wilayah publik dan politik. Barry Rubin, direktur Global Research Center di Urusan Internasional, mengatakan pemilihan pada kenyataannya menandai revolusi Islam secara diam-diam. Dia mengatakan Turki adalah pada titik balik: "Tentu saja, itu akan memakan waktu, namun sekarang Turki terletak di jalur yang mengakhiri republik Kemal Ataturk didirikan oleh pada tahun 1920. Turki sekularisme dan orientasi Barat telah selesai (Jerusalem Post, 13 Juni).

Dalam pidato kemenangannya, Erdogan menggarisbawahi bahwa Turki Anti-Israel dan Pro-Palestina. Perdana menteri Turki mengirim pesan bahwa ia sepenuhnya berniat untuk mendukung perjuangan Palestina melawan Israel, inlah yang diharapkan ummat Islam sedunia setelah Mesir, Bangladesh, Iran yang dan Turki akan menjadi kekuatan revolusi Islam di Dunia. AKP telah terpilih kembali sebagai Partai berkuasa di Turki untuk masa jabatan ketiga, Kebijakan luar negeri Turki Anti Imperialisme Barat, orientasi menuju kebijakan yang didasarkan pada kepemimpinan Islam. Dan kebijakan seperti itu, sebagai Erdogan telah membuat jelas, harus mencakup oposisi terhadap

Israel membuat Partai ini semakin kokoh. Turki akan menentang keberingasan Israel di Palestina, dan Turki akan membantu rakyat Palestina.[7]

Selain itu juga terjadinya krisis hubungan Turki-Israel yang dipicu oleh tewasnya sembilan aktivis Turki di kapal Mavi Marmara ketika berlayar menuju Jalur Gaza tahun lalu akibat tembakan Israel. Yang kemudian Turki berani mengambil sikap tegas dengan mengusir Duta Besar Israel untuk Turki dan membekukan hubungan militer kedua negara karena Israel menolak meminta maaf. Turki kini sibuk menguburkan para jenasah yang memang sejak awalnya bertekad bergabung dengan para syuhada Palestina. Hubungan simbolik ini tidak akan pecah sehingga menjadi amunisi baru bagi politisi Turki yang menginginkan diakhirinya hubungan dengan Israel.

Israel tidak senang atas perubahan karakter demokratik politik Turki. Mereka menyalahkan kecenderungan Islamis yang ditampakkan PM Recep Tayyip Erdogan dalam perjuangan rakyat Palestina. Turki dalam pandangan mereka telah berubah dari oportunis politik menjadi pan-Islamis.

2. Ekonomi dan Militer

a. Ekonomi

Kepentingan Turki di bidang ekonomi dengan mendukung Palestina untuk menjadi anggota PBB adalah untuk merangkul dunia Arab. Karena Erdogan juga punya popularitas di dunia Arab untuk menancapkan pengaruhnya di kawasan. Publik Arab kini mengidolakan Erdogan yang bersih, tegas, dan demokratis.

---

[7] "Partai Islam Menang Di Turki, Israel Ketar Ketir", dalam http://www.kompasiana.con, diakses 17 Oktober 2011, jam 20.30 WIB.

Hampir semua kekuatan politik di Mesir, Tunisia, dan Libya, yang diwarnai persaingan antara kubu islamis dan liberalis, menginginkan demokrasi model Turki di tiga negara Arab tersebut. Turki adalah negara demokrasi sipil, terbuka, dan dipimpin oleh partai islamis ataupun partai beraliran non-agama. Erdogan bisa memanfaatkan popularitas itu untuk mendekati kubu islamis, khususnya Ikhwanul Muslimin, di Mesir, Tunisia, dan Libya agar bersedia mengadopsi kebijakan atau platform Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki saat ini. Jika pendekatan Erdogan berhasil mencapai tujuan, Turki akan menghamparkan karpet merah bagi budaya demokrasi di dunia Arab. Hal ini akan membuka hubungan luas Turki-Arab di segala bidang. Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu menulis artikel di harian Mesir Al Ahram edisi Selasa menegaskan, Turki menginginkan kemitraan strategis dengan Mesir untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan pembangunan. Menurut Davutoglu, nilai investasi Turki di Mesir dalam lima tahun terakhir ini melampaui 1 miliar dollar AS, naik dari sebelumnya yang hanya 100 juta dollar AS. Neraca perdagangan kedua negara meningkat 300 persen lebih dalam lima tahun terakhir ini. Misi di balik lawatan Erdogan ke Mesir, Tunisia, dan Libya saat ini adalah ingin semakin memperkuat investasi politik dan ekonomi Turki di tiga negara Arab pasca-revolusi.

b. Militer

Friksi antara pemerintah dan militer dipicu oleh nasib 43 jenderal yang saat ini mendekam di penjara dengan tudingan berusaha mengkudeta pemerintah Erdogan. Proses hukum bagi para jenderal tersebut masih berlanjut. Sejatinya upaya Ankara melakukan reformasi untuk mengurangi dan menghapus pengaruh serta peran militer di kancah politik merupakan faktor utama friksi antara militer dan penguasa Turki. Militer Turki selama 80 tahun lalu menjadi pengambil keputusan tertinggi, namun peran mereka mulai menurun sejak Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) berkuasa. Ankara berencana menggabungkan komandan staf militer Turki dengan Departemen Pertahanan.[8]

3. Konteks Internasional

Kepentingan Turki dengan mendukung Palestina untuk menjadi anggota PBB adalah Turki berupaya meningkatkan peran dan pengaruhnya di tingkat regional dan internasional. Ankara berupaya menjadikan Turki sebagai model negara sekuler yang dihuni oleh mayoritas muslim. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang memimpin Turki saat ini berupaya mendongkrak posisinya di kawasan dengan mempropagandakan negara sekuler sebagai model di kawasan. Ankara berupaya menampilkan dirinya sebagai pendukung revolusi rakyat Timur Tengah. Tidak hanya itu, Turki juga berupaya mengalihkan isu kebangkitan Islam yang diusung Iran sebagai model

[8] "Israel Cemas Atas Perubahan Kepemimpinan Militer Turki", dalam http://www.islamiccentretangsel.com, diakses 17 Oktober 2011, jam 21.19 WIB.

alternatif kebangkitan rakyat kawasan dengan menawarkan model negara sekuler.

Dengan mendukung Palestina menjadi anggota PBB dan adanya Insiden berdarah terhadap warga Turki dalam pengiriman kapal bantuan kemanusian telah menjadikan Turki menjadi pembela terpenting Palestina. Pemimpin Turki memiliki kredibilitas yang tinggi di mata rakyat Arab ketimbang para pemimpin Palestina sendiri. Turki juga tidak dipandang berbahaya seperti halnya Iran dalam pandangan internasional. Keinginan beberapa pemimpin Negara Arab diatas kertas yang menginginkan dipulihkannya pembicaraan damai Israel-Palestina tidak akan terwujud jika Turki tetap bersikeras menyeret kejahatan Israel ke Dewan Keamanan PBB.

Dan untuk mencapai kepentingan nasional seperti yang diharapkan diatas, maka setiap negara harus mengkaitkan kepentingan nasionalnya melalui upaya kerjasama dengan banyak bangsa dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan keamanan global. Terkait hal tersebut di atas setiap negara selalu berupaya melakukan kerjasama dengan negara lain, baik dalam bentuk kerjasama bilateral maupun multilateral. Untuk merealisasikan kerjasama tersebut diperlukan kebijakan luar negeri yang dimaksudkan sebagai alat diplomasi dalam rangka menjamin dan mengembangkan kepentingan nasionalnya. Dengan demikian terdapat kaitan yang sangat erat antara kepentingan nasional dengan kebijakan luar negeri suatu negara.

Dalam konteks ini kebijakan luar negeri menarik korelasi yang begitu erat dengan kepentingan nasional, antara lain dinyatakan bahwa kebijakan luar negeri

suatu negara sudah seharusnya didasarkan pada beberapa sumber yang mengacu pada berbagai bentuk kepentingan nasionalnya. Namun sebelum melakukan kerjasama yang formal antar Negara, hendaknya suatau negara terlebih dulu mengakui kedaulatan Negara yang ingin diajak kerjasama.

Gambar aplikasi teori pengambilan keputusan luar negeri William D Coplin.

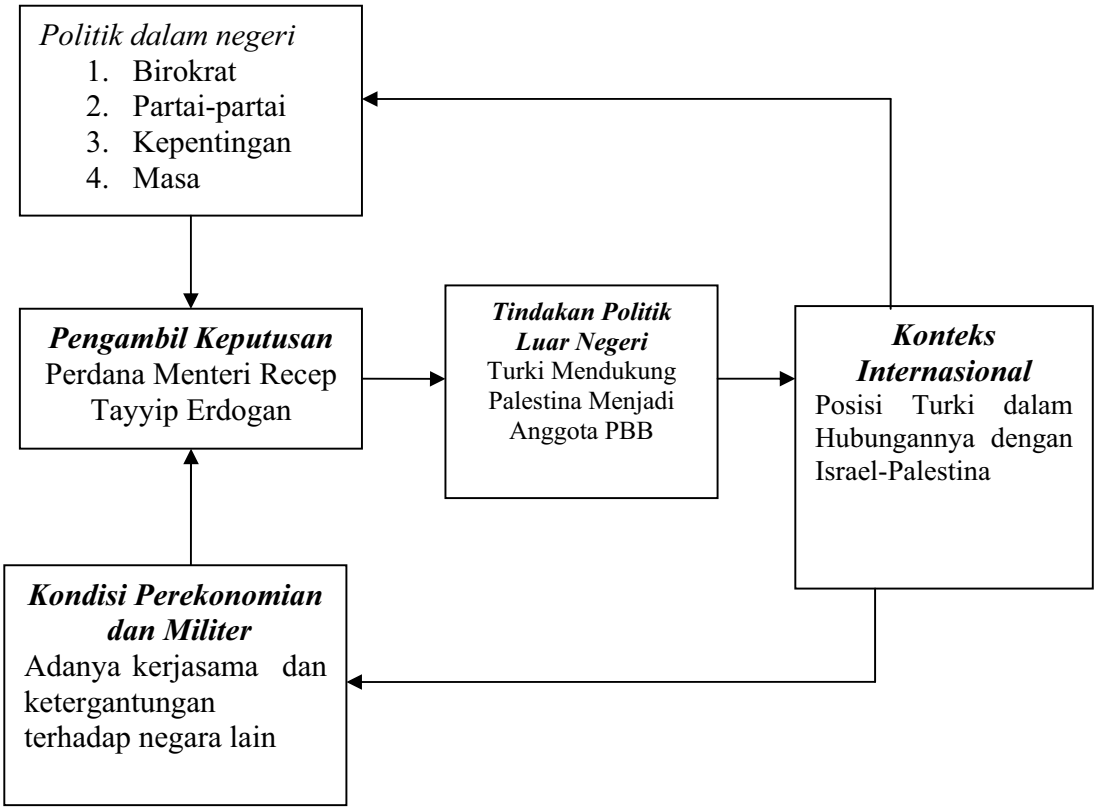

Gambar 2.
Aplikasi Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

F. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan teori di atas, maka dapat diambil hipotesis bahwa Kepentingan Turki dalam Mendukung Palestina untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dipengaruhi oleh:

1. Politik dalam negeri, yaitu untuk memperkuat Partai Keadilan dan Pembangunan yang ingin menjadikan Turki sebagai negara sekuler ke arah yang lebih religius untuk perubahan karakter demokratik politik Turki
2. Ekonomi Militer, yaitu untuk memperkuat investasi politik dan ekonomi Turki di negara Arab pasca-revolusi.

G. Metode Penulisan

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Library Research dan interview dengan memanfaatkan data-data skunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan simpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.

H. Jangkauan Penelitian

Penelitian dengan judul “Kepentingan Turki Dalam Mendukung Palestina menjadi anggota PBB”dibatasi dengan fakta-fakta yang terjadi setelah Hamas-dan Fatah bersatu, pada tanggal 27 April 2011 sampai Turki menggalang dukungan dari negara-negara anggota PBB dan ancaman veto dari Amerika Serikat, tetapi

tidak menutup kemungkinan pada tahun sebelumnya yang masih relevan dengan pokok permasalahan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan utuh.

Bab I Menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri dari Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Kerangka Penulisan, dan daftar Pustaka.

Bab II Tentang penjelasan dinamika politik luar negeri Turki terhadap dunia Islam, yang berisi gambaran umum tentang Turki, Turki dibawah kepemimpinan Militer, Turki dibawah kepemimpinan Sipil.

Bab III Dinamika Perjalanan Palestina menjadi Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berisi tentang negara Palestina, Pengajuan Palestina Keanggotaan PBB, Pro dan Kontra Dukungan Palestina dalam Keanggotaan PBB dan Ketegasan Politik Luar Negeri Turki mendukung keanggotaan Palestina di PBB.

Bab IV Kepentingan Turki Dalam Mendukung Kedaulatan Palestina menjadi anggota PBB meliputi kepentingan dalam negeri, ekonomi militer

Bab V Kesimpulan dan Penutup, berisi penyimpulan dan kata penutup yang dapat ditarik dari pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya.